



Melampaui Modernitas: Menata Ulang Keteraturan Sosial Pasca COVID-19

Oleh
Muhammad Alif Alauddin
Intern di The Habibie Center
thc@habibiecenter.or.id

Pendahuluan

Dunia kini telah memasuki fase baru dari perjalanan satu tahun lebih berhadapan dengan pandemi COVID-19. Perlahan berbagai negara memulai program vaksinasi yang ditujukan untuk ketahanan komunal (*herd immunity*) sehingga seluruh aktivitas dapat berjalan seperti sedia kala. Produksi vaksin yang dominan dipelopori oleh negara-negara maju menjadi kunci percepatan upaya vaksinasi bagi seluruh populasi di dunia. Berbagai perusahaan produsen vaksin antara lain Moderna, Johnson & Johnson dan Pfizer dari Amerika Serikat, BioNTech dari Jerman, AstraZeneca dari Inggris, serta Sinovac Biotech Ltd perusahaan vaksin besutan Tiongkok. Produk mereka dibeli oleh negara lain melalui upaya diplomasi baik melalui skema *Business-to-Business* (B2B) maupun alih teknologi. Namun demikian, permasalahan baru muncul akibat kesenjangan ketersediaan vaksin khususnya di negara berkembang yang hingga saat ini masih berkuat pada penanganan COVID-19 itu sendiri.¹ Studi yang baru saja dirilis oleh John Hopkins University memprediksi Indonesia membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun hingga terbebas dari COVID-19. Hal ini merujuk pada angka vaksinasi harian yang lambat yaitu 60.433 dosis saja.² Jika dibandingkan dengan negara asal produsen vaksin, rata-rata mereka hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 tahun.

Guna mencapai ketahanan komunal, diperlukan setidaknya 60-70 persen dari total populasi yang telah divaksin.³ Hal ini menandakan, sekiranya dibutuhkan 162 juta warga Indonesia untuk segera

1 Lihat komentar WHO terkait keserakahan negara maju dalam distribusi vaksin di investigasi BBC

2 Terdapat perdebatan atas studi ini karena data yang dimasukkan oleh Bloomberg tidak sesuai dengan real-time jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, dan Klinik Kesehatan di Indonesia.

3 Angka didapatkan berdasarkan penuturan Dr. Anthony S. Fauci yang menyebutkan estimasi angka 60-70% pada Desember 2020. Semula ia mengestimasi 70-75%, kemudian ia menyatakan ulang pada interview yang dilakukan oleh CNBC sebesar 75, 80, 85% dan 75 hingga di atas 80%.



divaksin. Terlepas dari itu, manusia perlu menyadari bahwa kehadiran vaksin merupakan satu dari puluhan rangkaian *puzzle* dari apa yang disebut sebagai modernitas. Kemajuan teknologi biomedik ini seakan menjadi tombol *restart* dari segala mimpi buruk umat manusia akibat pandemi COVID-19 karena segala lini aktivitas baik sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga kebijakan publik terkena dampaknya. Tujuan tulisan ini berusaha menggali seperti apa wajah keteraturan sosial setelah pandemi usai di Indonesia. Apakah masyarakat akan kembali pada aktivitas normal seperti sebelum COVID-19 mewabah? Atau akankah ada dan pada tataran apa perilaku baru muncul pasca COVID-19? Guna menjawabnya penulis mengelaborasi konsep hiperealitas dan modernitas.⁴

Runtuhnya Ilusi Simbolik

Sebelum pandemi COVID-19 menghantam dunia pada akhir Desember 2019,⁵ manusia hidup dalam pusaran realitas semu. Hal ini didasari oleh berbagai gaya hidup glamor yang jauh dari kebutuhan dasar yang mana menurut Maslow dalam McLeod (2007), kebutuhan manusia sejatinya hanya terdiri dari kebutuhan psikis (*psychological needs*) seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan keamanan (*safety needs*) yaitu keamanan dan keselamatan.⁶ Seorang sosiolog sekaligus filsuf kontemporer, Jean Baudrillard, menggariskan tren tersebut sebagai semiotika.⁷ Dalam telaah semiotika, segala sesuatu yang berkaitan dengan tanda (*sign*) merupakan alat untuk berdusta yang mana kemudian terkonstruksi ke dalam pemaknaan (*meaning*) dan proses penandaan (*signification*). Singkatnya, suasana kedustaan yang ditunjukkan oleh tanda atau simbol menyebabkan manusia terjebak mengonsumsi secara berlebihan sesuatu yang sedikit nilai esensinya.

Manusia berorientasi mengumpulkan sebanyak-banyaknya sumber daya guna memperoleh status yang lebih tinggi. Manusia terbius dengan simbol-simbol konsumtif yang menurut Baudrillard (1994) disebut dengan hiperealitas.⁸ Keadaan ini mendorong manusia mengonsumsi bukan hal yang menjadi kebutuhan dasarnya, melainkan karena pengaruh simbol-simbol yang mengarah pada gaya hidup yang tinggi. Manusia terhipnotis dengan barang bermerek yang tak lain merupakan simbol. Sebut saja aksesoris yang melekat di tubuh seperti tas, perhiasan, pakaian, telepon genggam dengan merek ternama, hingga kendaraan pribadi seperti mobil impor asal Eropa. Contoh kecil sebagai permisalan, ketika membeli secangkir kopi dari kedai ternama dengan harga Rp. 50.000, muncul pertanyaan mengapa kita rela membayar begitu mahal hanya untuk secangkir kopi? Anggap saja harga dasar dari kopi tersebut hanya berkisar Rp.10.000, maka Rp. 40.000 sisanya merupakan ongkos

4 Hiperrealitas merupakan konsep sosiologis yang menerangkan bahwa kesadaran manusia didorong untuk mengonsumsi simbol yang dimanifestasikan dalam barang-barang dengan merek terkenal secara berlebihan dengan tujuan memperoleh status sosial lebih tinggi.





yang kita keluarkan untuk membeli simbol kedai ternama itu. Harga atas simbol itu disebut dengan hiperealitas.

Kekeliruan pada praktek semacam itu terletak pada kepuasan imajiner yang dijadikan sebagai basis utama bisnis. Jika kita mengira bahwa perusahaan sejenis kedai kopi ternama atau sejenisnya menjual minuman, sebetulnya tidak. Mereka sebenarnya menjual simbol yang dikonstruksikan seolah-olah hadir sebagai realita. Namun ketika pandemi COVID-19 melanda, fenomena ini berhenti seketika. Dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pertama kali di Jakarta pada 10 April 2020 dan diperpanjang tiga putaran hingga 4 Juni 2020, mobilitas sosial masyarakat dibatasi dengan ketat. Selama masa itu, seluruh sektor bisnis dialihkan menjadi *work from home*, hanya perusahaan yang memasok kebutuhan esensial yang diizinkan beroperasi.

Sebelum pandemi, menghamburkan uang di pusat perbelanjaan merupakan ajang mendongkrak status, namun ketika kebijakan PSBB diterapkan, masyarakat tidak lagi tergiur karena lebih mengutamakan keselamatan diri daripada memuaskan hasrat konsumtif. Akibatnya, pengusaha mall merugi Rp. 200 Triliun.⁹ Hal ini merupakan pukulan telak bagi industri hiperealis. Pandemi seakan menjadi tombol *reboot* kembalinya ritme kehidupan normal. Manusia tersadarkan bahwa selama ini hidup dalam realitas palsu yakni mengkultuskan simbol demi mendongkrak status sosial yang sebetulnya tidak dibutuhkan. Selama ini kita dengan sia-sia membiayai kebutuhan imajinasi lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan utama. Kebijakan PSBB meruntuhkan sementara ilusi simbolik yang selama ini mengelabui manusia urban.

Wajah Keteraturan Sosial Ke Depan

Pada dasarnya, tidak ada yang tahu akan seperti apa dan bagaimana masyarakat menjalani kehidupan setelah pandemi COVID-19 ini usai.¹⁰ Pandemi secara tidak langsung mengajarkan apa yang terjadi pada seseorang akan berdampak ke orang lain, bahkan kepada mereka yang terpisah jauh. Sehingga penting bagi tiap individu untuk menjaga apa yang semestinya dilakukan bagi orang lain termasuk pada mereka yang tidak dikenal sekalipun. Dalam sudut pandang sosiologi, virus corona mampu menembus ruang dan waktu sehingga menimbulkan restrukturisasi relasi sosial yang semakin sulit dibatasi (*indefinite*). Akibatnya, dalam kurun waktu ke depan seluruh pola-pola dinamis dari tindakan maupun hubungan sosial tidak lagi mengenal batas, termasuk perpindahan cara berkomunikasi dari dunia riil ke dalam dimensi virtual yang akan menjadi kebiasaan baru. Potret ini dikemukakan Giddens (1998) sebagai modernitas tinggi.¹¹





Modernitas menimbulkan ketergantungan manusia dengan teknologi. Tentu penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan akan mempermudah dan mempercepat pekerjaan, tetapi di lain sisi juga menciptakan suatu resiko. Kenyataannya, ketika memasuki fase modernitas tinggi, selanjutnya yang akan terjadi ialah perubahan yang sangat cepat dan radikal. Hal ini disebabkan seluruh aspek yang ada seperti kebudayaan, ekonomi, pendidikan akan mengikuti kecepatan teknologi. Resiko yang muncul kemudian yakni timbulnya *late-modernity* pada sektor kebijakan baik di tingkat nasional maupun daerah. Hal ini dapat terjadi karena perubahan modernitas yang sangat cepat namun tidak diikuti dengan reformasi kebijakan publik yang agresif.

Kekhawatiran ini disebabkan atas pelibatan ilmuwan yang sangat minim untuk bisa mempengaruhi kebijakan negara. Kita melihat pada awal masa pandemi, pemerintah terlihat abai atas rekomendasi-rekomendasi yang diajukan oleh ilmuwan seperti Dewan Guru Besar FKUI yang meminta *lockdown*,¹² mahalnya biaya APD yang diprotes oleh Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI),¹³ kajian Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) atas opsi *herd immunity*,¹⁴ hingga rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) agar tidak terburu-buru dilaksanakan vaksinasi nasional.¹⁵ Situasi ini kemudian mengamplifikasi kegagalan pemerintah pada fase pencegahan dan mitigasi di awal COVID-19 sehingga anggaran penanganan COVID-19 membengkak hingga mencapai Rp. 905,1 triliun¹⁶ dibandingkan ongkos yang harus dibayarkan apabila Jakarta menerapkan karantina wilayah yang hanya membutuhkan Rp. 550 miliar per hari.¹⁷ Dengan demikian, pasca pandemi ini usai, para pengambil kebijakan dituntut untuk responsif dan tanggap dengan laju kecepatan modernitas.

Simpulan

Selepas pandemi COVID-19 usai, kita akan memasuki fase perilaku sosial baru dimana manusia akan lebih menimbang dalam memenuhi kebutuhan primer di atas kebutuhan imajiner. Industri yang membasiskan bisnisnya pada simbol mengalami titik jenuh atas guncangan modernitas yang menyadarkan manusia dari realitas semu. Namun demikian, pandemi turut mendorong modernitas semakin kuat dimana menyebabkan ketergantungan manusia dengan teknologi yang secara sosial mengubah pola interaksi dan hubungan antar komunitas. Dalam merespon hal ini, pemerintah dituntut beradaptasi cepat dengan mendorong percepatan reformasi birokrasi dalam merespon digitalisasi sosial serta turut melibatkan ilmuwan dalam setiap pengambilan langkah strategis dalam proses pemulihan perubahan pola relasi sosial pasca pandemi ini usai.





Endnotes

- 1 Cuddy, Alice. (2020, November 22). Coronavirus vaccines: Will any countries get left out?. Retrieved on 08 March 2021, from <https://www.bbc.com/news/world-54961045>
- 2 Straits Times. (2021, February 6). Pandemic could end in 7 years at current pace of vaccination. Retrieved on 21 February, from <https://www.straitstimes.com/world/pandemic-could-end-in-7-years-at-current-pace-of-vaccination>
- 3 Jr McNeil, Donald G. (2021, February 22). How Much Herd Immunity Is Enough?. Retrieved on 22 February 2020, from <https://www.nytimes.com/2020/12/24/health/herd-immunity-covid-coronavirus.html>
- 4 Baudrillard, J. (1988). The hyper-realism of simulation. *Jean Baudrillard: selected writings*, 143-147.
- 5 Cennimo, David J. (2021, February 22). How did the coronavirus outbreak start?. Retrieved on 22 February 2020, from <https://www.medscape.com/answers/2500114-197402/how-did-the-coronavirus-outbreak-start>
- 6 McLeod, S. (2007). Maslow's hierarchy of needs. *Simply psychology*, 1, 1-8.
- 7 Baudrillard, J. (1994). *Simulacra and simulation*. University of Michigan press.
- 8 *Ibid.*
- 9 Uly, Yohana Artha. (2020, September 28). Terpukul Pandemi, Pengusaha Mal Rugi Rp 200 Triliun. Retrieved on 08 March 2020, from <https://money.kompas.com/read/2020/09/28/193900826/terpukul-pandemi-pengusaha-mal-rugi-rp-200-triliun?page=all>
- 10 BBC. (2021). Coronavirus: How can society thrive post-pandemic?. Retrieved on 24 February 2021, from <https://www.bbc.com/worklife/article/20201118-coronavirus-how-will-it-affect-inequalities-mental-health>
- 11 Giddens, A., & Pierson, C. (1998). *Conversations with Anthony Giddens: Making sense of modernity*. Stanford University Press.
- 12 Kumparan. (2020, March 26). Dewan Guru Besar FKUI Desak Pemerintah Terapkan Lockdown. Retrieved on 24 February 2021, from <https://kumparan.com/kumparannews/dewan-guru-besar-fkui-desak-pemerintah-terapkan-lockdown-1t6LlsoKYUv>
- 13 CNN Indonesia. (2020, April 04). APD Mahal, PDUI Kirim Surat Terbuka untuk Jokowi. Retrieved on 24 February 2021, from <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200411133252-255-492582/apd-mahal-pdui-kirim-surat-terbuka-untuk-jokowi>
- 14 Bernie, Mohammad. (2020, March 28). PAPDI: Herd Immunity Pada COVID-19 Bisa Musnahkan 1 Generasi. Retrieved on 24 February 2021, from <https://tirto.id/papdi-herd-immunity-pada-covid-19-bisa-musnahkan-1-generasi-eJhk>
- 15 Astuti, Nur Azizah Rizki. (2020, October 22). IDI Surati Menkes Terawan, Minta Vaksinasi Corona Tak Dilakukan Tergesa-gesa. Retrieved on 24 February 2021, from <https://news.detik.com/berita/d-5223685/idi-surati-menkes-terawan-minta-vaksinasi-corona-tak-dilakukan-tergesa-gesa>
- 16 CNN Indonesia. (2020, July 6). Sri Mulyani Sebut Dana Penanganan Corona Naik Jadi Rp905 T. Retrieved on 24 February 2021, from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200619172653-532-515291/sri-mulyani-sebut-dana-penanganan-corona-naik-jadi-rp905-t>
- 17 Hakim, Rakhmat Nur. (2020, April 22). Jokowi Ungkap Anggaran untuk "Lockdown" Jakarta, Rp 550 Miliar Per Hari. Retrieved on 22 February 2020, from <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/22/21505861/jokowi-ungkap-anggaran-untuk-lockdown-jakarta-rp-550-miliar-per-hari?page=all>





THC INSIGHTS

THC Insights are timely and policy-relevant analysis of current political, economic and socio-cultural issues affecting Indonesia and the region. The expert observations and recommendations are produced by researchers at The Habibie Center. Disclaimer: The opinions expressed in this article are those of the author and do not necessarily represent those of The Habibie Center.

The Habibie Center was founded by Bacharuddin Jusuf Habibie and family in 1999 as an independent, non-government, non-profit organisation. The vision of The Habibie Center is to create a structurally democratic society founded on the morality and integrity of cultural and religious values. The mission of The Habibie Center are first, to establish a structurally and culturally democratic society that recognizes, respects, and promotes human rights by undertaking study and advocacy of issues related to democratization and human rights, and second, to increase the effectiveness of the management of human resources and the spread of technology.

Contact:

The Habibie Center
Jl. Kemang Selatan No. 98, Jakarta 12560
Tel: +62 21 781 7211 | Fax: +62 21 781 7212
Email: thc@habibiecenter.or.id
Website: www.habibiecenter.or.id